

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DBH, DAU, DAK TERHADAP BELANJA MODAL

Anisa May¹, Rafrini Amyulianthy², Tryas Chasbiandani³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Email : tryas@univpancasila.ac.id

Diterima 06 Agustus 2021, Disetujui 02 Maret 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun karena peruntukannya yang berbeda, penulis memaparkan tentang dana perimbangan. Data yang digunakan adalah data panel yang meliputi data pertumbuhan dana pendapatan asli daerah, pertumbuhan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen, dan belanja modal sebagai variabel dependen di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. provinsi selama periode penelitian 2014-2018. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program Eviews-11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan dana bagi hasil, pertumbuhan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, tetapi secara simultan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (Belanja Modal)

Abstract

The purpose of this study is determine the effect of fund local own revenue, sharing-revenue fund, general allocation funds and special allocation funds on capital expenditures. Sharing-revenue funds, general allocation funds and special allocation funds are equalization fund and a unit that cannot be separated, but due to different allocations, the authors describe the equalization funds. The data used is panel data which includes data on growth of fund local own revenue, growth in sharing-revenue fund, general allocation funds and special allocation funds as independent variables, and capital expenditure as the dependent variable in several districts and cities in West Java province during the 2014-2018 research period. The method of analysis used is multiple linear regression using the Eviews-11 program. The results showed that the growth of local own revenue, the growth of sharing-revenue funds, the growth of general allocation funds had a significant effect on capital spending. Meanwhile, the growth of special allocation funds has no effect on capital expenditure, but simultaneously the equalization fund have an effect on capital spending.

Keywords: Fund Local Own Revenue (PAD), Sharing-revenue Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Capital Expenditure (Belanja Modal)

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun memberikan perbedaan yang sangat pesat seperti di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Pembangunan infrastruktur dan perkembangan sarana prasarana yang memadai membuat masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan produktivitasnya.

Tentunya dengan pembangunan infrastruktur yang semakin maju akan mendorong para investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Jika banyak investor yang tertarik untuk membuka usaha di daerah tersebut, maka kegiatan ekonomi akan berjalan lancar dan manfaatnya akan terus dirasakan hingga berkelanjutan. Sehingga kegiatan belanja modal sangat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan perkembangan infrastruktur dan sarana prasarana tersebut.

Kegiatan pembangunan infrastruktur daerah dikenal dengan sebutan belanja modal. Belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah.

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2016 (ribu rupiah)

Belanja Langsung	
Belanja Pegawai	1.236.057.531
Belanja Barang dan Jasa	9.873.382.546
Belanja Modal	8.636.321.796

Sumber : Data Badan Pusat Statistik

Bersumber pada Data Badan Pusat Statistik, selama empat tahun tersebut realisasi belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat menonjol pada belanja barang dan jasa. Padahal, sebagaimana diketahui belanja barang dan jasa lebih ditekankan pada biaya operasional pemerintah sedangkan belanja modal merupakan murni investasi pemerintah.

Belanja modal mempunyai efek yang lebih besar untuk pembangunan. Belanja modal harus didorong sebesar mungkin karena efek percepatannya untuk pertumbuhan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan belanja barang atau pegawai. Besarnya *multiplier effect* (efek pengganda) dari belanja modal maka belanja modal layak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN).

Untuk membiayai belanja modal tentunya memerlukan sumber- sumber dana yang besar dan telah diatur dalam UU No 33 Tahun 2004. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah dan dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2016
Menurut Jenis Pendapatan (persentase)

Tahun	Laju pertumbuhan PAD	Laju Pertumbuhan Dana Perimbangan
2014	25%	17%
2015	27%	13%
2016	27%	84%

Sumber : Data Badan Pusat Statistik

Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Sebaliknya, peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak terpakai untuk membiayai belanja lainnya.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak signifikan. Yovita (2011) juga mengatakan bahwa provinsi dengan Pendapatan Asli (PAD) yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar.

Realisasi dana perimbangan provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan di tahun 2016. Selama empat tahun tersebut provinsi Jawa Barat berhasil merealisasikan 0,2085 atau 21% dari anggaran Dana Perimbangan. Jumlah tersebut terdiri dari Bagi Hasil Pajak Rp 5,677 triliun atau 6%, Dana Alokasi Umum Rp 5,710 Miliar atau 6%, dan Dana Alokasi Khusus Rp 7,924 miliar atau 9%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rohiatul Janah, dkk (2017) menemukan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang penulis dalam penyusunan penelitian ini seperti terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adanya kecenderungan naiknya porsi belanja modal pemerintah daerah yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembangunan dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta pengaruh pendapatan pemerintah daerah terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat pada periode penelitian 2014 sampai dengan 2018. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DBH, DAU, DAK TERHADAP BELANJA MODAL (studi empiris kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode penelitian 2014- 2018.”**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi se-Jawa Barat.

KAJIAN TEORI

Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori institusional berhubungan dengan struktur sosial. Teori institusional memperlihatkan bagaimana struktur seperti skema, aturan, norma, dan rutin menjadi bentuk yang bersifat otoritatif untuk terjadinya perilaku sosial (Scoot, 2004). Dengan begitu otonomi daerah merupakan akibat dari adanya teori institusional.

Dengan mendasar pada teori ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan serta untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali pendanaan dan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Coersive pressures (tekanan koersif) menyebabkan *isomorphism* (proses yang berkelanjutan) yang merupakan proses penyesuaian menuju kesamaan dengan cara pemaksaan. Tekanan datang dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Misalnya seperti, seperti tekanan resmi datang dari peraturan pemerintah dan organisasi yang lebih tinggi agar bisa diakui (DiMaggio et al, 1983).

Berdasarkan teori institusional, organisasi yang memiliki ketergantungan sumber daya (bantuan dana) dari organisasi lain, akan mengalami *coersive pressures* (tekanan koersif) dari organisasi yang diberikan bantuan dana tersebut (Falkman dan Tagesson, 2008).

Dalam konteks pengelolaan keuangan di Indonesia Pemda menerima bantuan dana dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan yang akan menjadi *coersive pressures* ialah bagaimana realisasi atas bantuan dana yang telah diberikan.

Teori Anggaran (*Budgeting Theory*)

Perhatian utama bagi pemerintah pusat maupun daerah ialah pengelolaan anggaran. Anggaran bisa disebut alat akuntansi karena dapat membantu pimpinan entitas dalam merencanakan dan mengendalikan operasi entitas. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009).

Hubungan dengan DAU, pemerintah pusat akan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang akan dialokasikan kepada keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan DAK melalui APBN yang akan digunakan untuk kegiatan khusus dan DBH dimana pemerintah menyusun rencana yang digunakan untuk kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dari DBH pajak dan sumber daya alam.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan dengan dasar pertimbangan suatu daerah yang lebih mengetahui apa saja dan bagaimana keadaan dan kebutuhan masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Abdurrahman, 1987). Otonomi daerah juga bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah mampu membangun dan memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik dapat meningkat dan banyak investor tertarik untuk berinvestasi pada daerah tersebut.

Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 dan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 8, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menimbulkan persoalan baru karena tingkat kesiapan fiskal dari masing-masing daerah berbeda. Daerah yang mempunyai banyak sumber potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah yang semakin besar yang pada akhirnya daerah tersebut akan semakin maju. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan daerah yang kurang atau tidak memiliki banyak potensi.

Belanja Modal

Kegiatan pembangunan infrastruktur daerah dikenal dengan sebutan belanja modal. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Mahsun, *et al.* 2013: 99. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasinal dan pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dibagi menjadi :

- a) Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Seperti pembangunan, perbaikan sektor Pendidikan, kesehatan dan transportasi.
- b) Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Seperti pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama yaitu: Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan dan mesin , Belanja modal gedung dan bangunan , Belanja modal jalan irigasi dan jaringan, Belanja modal fisik lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dipungut sesuai peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2008). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama hubungan ini adalah untuk mencapai perimbangan agar potensi dan sumber daya di masing-masing daerah bisa dibagi dengan sesuai, selain itu dana perimbangan juga dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, komponen dana perimbangan dibagi menjadi:

a. Dana bagi hasil

Pemerintah daerah masih dapat meningkatkan penerimaan daerah dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penerimaan dana bagi hasil setiap daerah tidak sama namun, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara, oleh karena itu dana bagi hasil sifatnya proporsional untuk setiap daerah.

b. Dana alokasi umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan mempunyai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat *block grant*, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Hal ini di perkuat dengan pendapat Oktora Fahri dkk, (2013) bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

Disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah Dana Alokasi Umum (DAU) juga bertujuan sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan DAU merupakan instrument penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*).

Oleh karena itu, bagi daerah yang relative minim Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003).

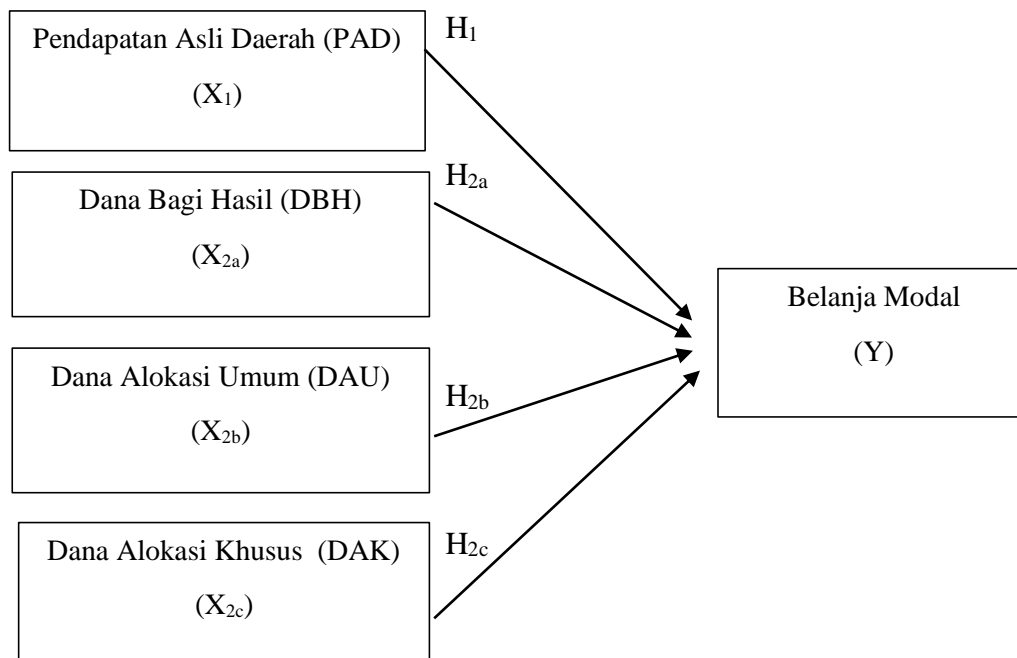
Pemerintah daerah menerima minimal 25% dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang harus dialokasikan untuk belanja infrastruktur.

c. Dana alokasi khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) secara keseluruhan berasal dari APBN namun pemerintah daerah penerima DAK diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping yang dianggarkan dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik kecuali daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data dan fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian (Dantes, 2012). Berikut hipotesis yang dikembangkan :

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_{2a} : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_{2b} : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_{2c} : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE

Kategori penelitian yang digunakan

Kategori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berjenis deskriptif.

Operasional Variabel

a. Pertumbuhan Belanja Modal (Y)

Pertumbuhan belanja modal merupakan hasil perhitungan dari total belanja modal tahun ini dikurangi dengan total belanja modal tahun lalu, kemudian dibagi dengan total belanja modal tahun lalu, dan dikali seratus persen sehingga hasilnya mencapai persen.

$$\Delta BM = \frac{(BM_t - BM_{t-1})}{BM_{t-1}} \times 100\%$$

b. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Pertumbuhan Pendapatan asli daerah merupakan hasil perhitungan dari total pendapatan asli daerah tahun ini dikurangi dengan total pendapatan asli daerah tahun lalu, kemudian dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun lalu, dan dikali seratus persen sehingga hasilnya mencapai persen.

$$\Delta PAD = \frac{(PAD_t - PAD_{t-1})}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

c. Pertumbuhan Dana Perimbangan (X₂)

Pertumbuhan dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) merupakan hasil perhitungan dari total dana perimbangan tahun sekarang dikurangi dengan total dana perimbangan tahun lalu, kemudian dibagi total dana perimbangan tahun lalu, dan dikali seratus persen sehingga hasilnya mencapai persen.

$$\Delta DP = \frac{(DP_t - DP_{t-1})}{DP_{t-1}} \times 100\%$$

Metode Analisis

Teknik regresi dipilih dalam dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan antar kedua jenis data yaitu data *cross-section* dan *time series*. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi :

1. Estimasi data panel, data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek/individu tetapi meliputi beberapa periode. Uji model dapat mempermudah penelitian dan lebih mengarahkan pada model yang diterima, uji model antara lain:
 - a. Uji chow (*chow test*) adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.
 - b. Uji hausman adalah pengujian statistik untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.
 - c. Uji legrange multiplier adalah pengujian statistik untuk menentukan apakah model *random effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.
2. Uji asumsi klasik merupakan salah satu pengujian prasyarat pada regresi berganda. Uji asumsi klasik hanya cukup menguji model yang diterima pada uji model untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji asumsi klasik antara lain:
 - a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data pengganggu atau residual data memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang digunakan harus terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2016). Variasi data terdistribusi normal apabila lebih besar dari signifikansi 5%.
 - b. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Variasi data dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai koefisien dibawah 0.8.
 - c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual (signifikansi 5%), maka dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (Sanusi, 2014).
 - d. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan periode sebelumnya. Uji autokorelasi tidak digunakan pada penelitian kali ini, dikarenakan uji ini menggunakan data panel dan tidak terdapat fitur uji ini pada *e-views* 11.
3. Analisis moderasi regresi, dilakukan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan dimoderasi oleh variabel moderasi. Sehingga model yang dapat dibentuk adalah :

$$Y = a + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_{2a} \cdot X_{2a} + \beta_{2b} \cdot X_{2b} + \beta_{2c} \cdot X_{2c} + e$$

Keterangan:

Y = Pengalokasian Belanja Modal

a = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_{2a} = Dana Bagi Hasil

X_{2b} = Dana Alokasi Umum

X_{2c} = Dana Alokasi Khusus

e = error

4. Uji Hipotesis

- a. Uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai yang digunakan merupakan nilai *adjusted* R^2 .
- b. Uji statistik t (*t-test*) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Penelitian sosial dibolehkan memakai tingkat interval 1%, 5%, atau 10% dan menurut Hair, dkk dalam Galuh (2019) menyatakan tingkat signifikansi 10% sesuai untuk penelitian dengan ukuran sampel yang terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif (N=70)

	BM	C	PAD	DBH	DAU	DAK
Mean	0.103857	1.000000	0.180000	0.040286	0.028429	0.707857
Median	0.080000	1.000000	0.135000	-0.010000	0.020000	0.115000
Maximum	0.860000	1.000000	0.880000	1.300000	0.120000	7.470000
Minimum	-0.450000	1.000000	-0.310000	-0.340000	-0.110000	-0.270000
Std. Dev.	0.261608	0.000000	0.253794	0.261717	0.044319	1.402402
Observations	70	70	70	70	70	70

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews-11

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Belanja Modal

Dari 70 sampel data, didapatkan pertumbuhan belanja modal tertinggi adalah 86% pada Kabupaten Indramayu tahun 2016 dan pertumbuhan terendah sebesar -45% pada Kabupaten Purwakarta tahun 2018. Nilai rata-rata pertumbuhan belanja modal adalah 0,10% dengan standar deviasi sebesar 0,26%.

2) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Dari 70 sampel data, didapatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi adalah 88% pada Kabupaten Indramayu tahun 2014 dan pertumbuhan terendah sebesar -31% pada Kabupaten

Bandung barat tahun 2018. Nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah 0,18% dengan standar deviasi sebesar 0,25%.

3) Pertumbuhan Dana Bagi Hasil

Dari 70 sampel data, didapatkan pertumbuhan dana bagi hasil tertinggi adalah 130% pada Kabupaten Bandung barat tahun 2016 dan pertumbuhan terendah sebesar -34% pada Kabupaten Purwakarta tahun 2015. Nilai rata-rata pertumbuhan dana bagi hasil adalah 0,04% dengan standar deviasi 0,26%.

4) Pertumbuhan Dana Alokasi Umum

Dari 70 sampel data, didapatkan pertumbuhan dana alokasi umum tertinggi adalah 12% pada Kabupaten Indramayu tahun 2014 dan pertumbuhan terendah sebesar -11% pada Kabupaten Bogor tahun 2016. Nilai rata-rata pertumbuhan dana alokasi umum adalah 0,02% dengan standar deviasi 0,04%.

5) Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus

Dari 70 sampel data, didapatkan pertumbuhan dana alokasi khusus tertinggi adalah 747% pada Kota Bekasi tahun 2016 dan pertumbuhan terendah sebesar -27% pada Kabupaten Purwakarta tahun 2014. Nilai rata-rata pertumbuhan dana alokasi khusus adalah 0,70% dengan standar deviasi 1,40%.

Hasil Uji Estimasi Data

Tabel 4. Hasil Uji Estimasi Data

Uji Estimasi Data	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Chow	<i>cross section F Chi-square</i> (0.7507) > 0,05	Diterima <i>common effect model</i>
Uji Hausman	Prob. (0.3817) > 0,05	Diterima <i>random effect model</i>
Uji Lagrange Multiplier	Breusch-Pagan (0.2459) > 0.05	Diterima <i>common effect model</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews-11

Berdasarkan hasil uji estimasi data pada tabel 4 di atas, didapatkan hasil *random effect model* terpilih satu kali dan *common effect model* terpilih dua kali, sehingga model terbaik untuk regresi dalam penelitian ini adalah *common effect model*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan pemilihan *common effect model*. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Normalitas	<i>P-value</i> (0.171087) > 0,05	Residual Normal
Uji Heteroskedastisitas	Prob. X_1 (0.6458) > 0.05 Prob. X_{2a} (0.6567) > 0.05 Prob. X_{2b} (0.3989) > 0.05 Prob. X_{2c} (0.8846) > 0.05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews-11

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada tabel 5, terbukti bahwa:

- Data memiliki residual normal, hal ini sesuai hasil uji normalitas di atas, dapat dilihat dengan nilai Jarque-Bera dan disimpulkan bahwa nilai probability (P-value) 0.171087 yang berarti nilai P-value $> 0,05$ ($0.171087 > 0,05$). Kesimpulannya H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya data residual berdistribusi normal.
- Data terbebas dari heteroskedastisitas, hal ini sesuai dengan hasil uji heteroskedastisitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai probability (P-value) dari X_1 (pertumbuhan pendapatan asli daerah), X_{2a} (pertumbuhan dana bagi hasil), X_{2b} (pertumbuhan dana alokasi umum), dan X_{2c} (pertumbuhan dana alokasi khusus) memiliki nilai probabilitas diatas 0.05. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas di antara variabel independen penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DBH	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.109510	0.328951	-0.184465
DBH	0.109510	1.000000	0.181964	0.499603
DAU	0.328951	0.181964	1.000000	0.105529
DAK	-0.184465	0.499603	0.105529	1.000000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews-11

Hasil dari uji multikolinearitas pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien tidak ada yang melebihi 0.80, maka H_0 diterima dan menunjukkan bahwa data tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hipotesis
C	-0.009917	0.041232	-0.240526	0.8107	
PAD	0.368329	0.123808	2.974998	0.0041**	Diterima
DBH	-0.362223	0.128726	-2.813907	0.0065**	Diterima
DAU	1.181564	0.688591	1.715916	0.0909*	Diterima
DAK	0.040231	0.024394	1.649192	0.1039	Ditolak
F-statistic	5.144719	R-squared	0.240467		
Prob(F-statistic)	0.001156	Adjusted R-squared	0.193726		

Ket: ** = signifikan 5%, * = signifikan 10%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Eviews-11

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 7 diatas, hasil probabilitas digunakan untuk melihat signifikansi dan regresi data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = -0.009917 + 0.368329(PAD) - 0.362223(DBH) + 1.181564(DAU) + 0.040231(DAK) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel menggunakan *Common effect Model* (CEM), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Konstanta (C)

Dari tabel persamaan regresi data panel diatas diperoleh nilai konstanta sebesar -0.009917 menyatakan bahwa apabila seluruh variabel independen konstan, maka nilai belanja modal sebesar -0.009917.

2) Koefisien Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Dari tabel persamaan regresi data panel diatas, koefisien pendapatan asli daerah (X_1) bernilai positif sebesar 0.368329%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 1%, maka akan menaikkan belanja modal sebesar 0.368329%.

3) Koefisien Dana Bagi Hasil (X_{2a})

Dari tabel persamaan regresi data panel diatas, koefisien dana bagi hasil (X_{2a}) sebesar -0.362223%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap penurunan pertumbuhan dana bagi hasil sebesar 1%, maka nilai belanja modal sebesar -0.362223%.

4) Koefisien Dana Alokasi Umum (X_{2b})

Dari tabel persamaan regresi data panel diatas, koefisien dana alokasi umum (X_{2b}) bernilai positif sebesar 1.181564%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan dana alokasi umum sebesar 1%, maka akan menaikkan belanja modal sebesar 1.181564%.

5) Koefisien Dana Alokasi Khusus (X_{2c})

Dari tabel persamaan regresi data panel diatas, koefisien dana alokasi khusus (X_{2c}) bernilai positif sebesar 0.040231%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan dana alokasi khusus sebesar 1%, maka akan menaikkan belanja modal sebesar 0.040231%.

Hasil Uji t

- a. Hipotesis Alternatif Pertama (H_1) menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Tingkat signifikansi yang digunakan pada variabel ini sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil pada tabel, pertumbuhan pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai probabilitas 0.0041, maka $0.0041 < 0.05$ yang memiliki arti H_1 diterima.
- b. Hipotesis Alternatif Kedua bagian a (H_{2a}) menyatakan bahwa pertumbuhan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Tingkat signifikansi yang digunakan pada variabel ini sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil pada tabel, pertumbuhan dana bagi hasil (X_{2a}) memiliki nilai probabilitas 0.0065, maka $0.0065 < 0.05$ yang memiliki arti H_{2a} diterima.
- c. Hipotesis Alternatif Kedua bagian b (H_{2b}) menyatakan bahwa pertumbuhan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Tingkat signifikansi yang digunakan pada variabel ini sebesar 10% atau 0,1. Berdasarkan hasil pada tabel, pertumbuhan dana alokasi umum (X_{2b}) memiliki nilai probabilitas 0.0909, maka $0.0909 < 0.1$ yang memiliki arti H_{2b} diterima.

- d. Hipotesis Alternatif Kedua bagian c (H_{2c}) menyatakan bahwa pertumbuhan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Tingkat signifikansi yang digunakan pada variabel ini sebesar 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil pada tabel, pertumbuhan dana alokasi khusus (X_{2c}) memiliki nilai probabilitas 0.1039, maka $0.1039 > 0.05$ yang memiliki arti H_{2c} ditolak.

Hasil uji simultan (uji f)

Berdasarkan hasil *output* nilai probabilitas 0.001156, maka $0.001156 < 0.05$, maka H_0 diterima dan dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat variabel independen (PAD, DBH, DAU, DAK) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Belanja Modal).

Uji Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil *output* nilai R 0.193726, yang memiliki arti keempat variabel independen mempengaruhi sebesar 19.3726% dan sisanya 80.6274% dipengaruhi variabel diluar keempat variabel independen yang dipakai pada penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Dengan studi empiris pada pemerintah kab/kota Provinsi Jawa Barat periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai probabilitas 0.0041, dimana $0.0041 < 0.05$. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah telah digunakan secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan sarana prasarana dengan meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik.

2. Dana Bagi Hasil (X_{2a})

Penelitian ini membuktikan bahwa dana bagi hasil memiliki nilai koefisien -0.362223% dan nilai probabilitas 0.0065, dimana $0.0065 < 0.05$. Artinya dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. artinya dana bagi hasil yang rendah menyebabkan belanja modal yang tinggi.

Hubungan negatif dana bagi hasil dengan belanja modal dimungkinkan karena dana bagi hasil yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga mempunyai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Sedangkan pendapatan di Provinsi Jawa Barat cenderung

merata di tiap daerahnya, seperti sudah meratanya pusat-pusat industri. Oleh karena itu menyebabkan minimnya ketimpangan fiskal di Provinsi Jawa Barat.

3. Dana Alokasi Umum (X_{2b})

Penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum memiliki nilai probabilitas 0.0909, maka $0.0909 < 0.1$. Artinya dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dana alokasi umum yang bersifat *block grant* memiliki arti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah telah berhasil merealisasikan dengan tepat. Dengan tercapainya tujuan tersebut, daerah yang menerima dana alokasi umum yang besar akan memiliki belanja modal yang besar pula.

4. Dana Alokasi Khusus (X_{2c})

Penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi khusus memiliki nilai probabilitas 0.1039, maka $0.1039 > 0.05$. Artinya dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus dialokasikan ke daerah-daerah tertentu yang untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan program prioritas nasional. Oleh karena itu tinggi rendahnya dana alokasi khusus tidak akan mempengaruhi belanja modal.

Saran

1. Saran Teoritis:

- a) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 14 kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian yang akan digunakan, sehingga akan mendekati gambaran hasil yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.
- b) Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penelitian, karena masih banyak variabel lain yang mungkin akan berpengaruh. Serta diharapkan dapat meneliti periode waktu dan tempat penelitian yang lebih luas sehingga sampel yang di akan diteliti akan lebih banyak.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan penelitian dibidang sektor publik dan anggaran publik.

2. Saran Praktis:

- a) Dilihat dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, maka saran untuk Pemprov Jawa Barat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang akan dialokasikan ke Belanja Modal. Karena walaupun tingkat kemandirian telah tercapai, dana perimbangan yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal menandakan bahwa Pemda Jawa Barat masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan sektor publik tersebut.

- b) Melihat dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, maka saran untuk Pemda Jawa Barat lebih memperhatikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang akan dialokasikan ke Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Puji, (2005-2018), "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018." *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 1, no. 1 (2020): 20-36.
- Aminus, Rahmi, (2012-2016), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 9, no. 1 (2018): 47-55.
- Andrian, Yusuf, and Agus Samekto.(2012-2013) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa." *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 10, no. 2 (2017): 139-152.
- Arifah, Noor Aini, and Haryanto Haryanto, (2013-2017), "Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017." *Diponegoro Journal of Accounting* 8, no. 2 (2019).
- Asnawi, Asnawi, and Zeni Sri Ulan, (2011-2014), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa." *Jurnal Education and Economics* 1, no. 4 (2018): 438-449.
- Aulia, Wan Rahmat, (2014-2017), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat Tahun 2014-2017)." *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi* (2019).
- BAB III Analisis Isu-isu Strategis RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025. <https://jabarprov.go.id/root/rpjpd/Bab%203s.pdf> Diakses 10 November 2020
- Dermawan, Wildan Dwi, (2014-2016), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* 5, no. 2 (2018).
- Fatimah, Nabiyatun Nur, Anita Nopiyanti, and Danang Mintoyuwono, (2014-2016), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah." *EQUITY* 22, no. 2 (2020): 197-214.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa, (2011-2016), "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah." *INOVASI* 14, no. 1 (2018): 44-52.
- Huda, Safiul, and Ati Sumiati. (2014-2016), "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 85-100.
- Istiqomah, Nur. "Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2018): 69-90.
- Jannah, Roihatul, Budi Wahono, and M. Agus Salim, (2009-2013), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH)

- Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015)." *Jurnal Warta Ekonomi* 6, no. 01 (2017).
- Kisworo, Joko, and Elvia Rosantina Shauki. "Teori institusional dalam penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik (studi kasus pada kementerian dan lembaga negara di Indonesia)." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 4, no. 4 (2019): 305-321.
- Lestari, Winda Putri, (2012-2015), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 6 (2017).
- Nugroho, Andreas Ell, and Meiril Hardi, (2014), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014." *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3, no. 02 (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Prastiwi, Ayu, Siti Nurlaela, and Yuli Chomsatu, (2008-2014)"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta." (2016).
- Priambudi, Wimpi, (2013), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6, no. 1 (2017): 136-147.
- Priatna, Husaeri, and Jaya Purwadinata, (2007-2016), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)." *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2019): 62-74.
- Rifai, Rachmawati A, (2010-2014), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsisulawesi Tengah." *Katalogis* 5, no. 7 (2017).
- Santoso, Erna, (2013-2015), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 3 (2017).
- Sidik, Muhamad, Syurya Hidayat, and Muhammad Ridwansyah, (2010-2019), "Dampak alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15, no. 2 (2020): 229-238.
- Sundari, Antika Widya, (2017-2018), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Luas Wilayah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2018)." *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi* (2020).
- Suryana, Suryana (2012-2015), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal." *JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS* 9, no. 2: 67-72.
- Susanti, Susi, and Heru Fahlevi, (2011-2014), "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 1 (2016): 183-191.

- Talluta, Dessyana Lourine, Rossy Lambelanova, and Ella Wargadinata, (2005-2017), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Silpa Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 8, no. 1 (2018): 43-66.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Verawaty, Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, and Nurhidayah Nurhidayah, (2014-2016), "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan." *Journal Management, Business, and Accounting* 19, no. 1 (2020): 21-37.
- Yawa, Herman, and Treesje Runtu, (2010-2014), "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 4 (2015).